

**KINERJA KEUANGAN
DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Brigita Erika Montolalu
NPP. 29.1483

*Asdaf Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara
Program Studi Keuangan Publik*

Email: brigitamontolalu05@gmail.com

ABSTRACK

Problem Statement/Background (GAP) *The Minahasa Regency Government's finances are currently in a bad state. With the cutting of transfer funds, the availability of budget in the regional treasury is running low. This has an impact on routine shopping activities which are also disrupted. The total incoming regional income is smaller than the expenditure made by the Minahasa Regency Government which is quite large. Purpose of this research is to measure how far Minahasa Regency is in implementing fiscal decentralization by looking at its regional financial performance.*

Method *used in this research is descriptive research method with an inductive qualitative approach. The data used in this study is the Budget Realization Report in Regency of Minahasa budget as secondary data and interviews as the primary data. The data was collected using unstructured interview techniques and documentation techniques. Data analysis using data reduction analysis methods, data presentation, and drawing conclusions.*

Results *showed that the financial performance of the Minahasa Regency was still relatively low, seen from the financial ratios, including the regional financial independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, harmony ratio and growth ratio. Conclusion* *Financial performance has been running quite effectively but in the implementation of regional financial management there are still some problems because there are inhibiting factors that hinder the process of regional financial performance in Minahasa Regency.*

Suggestions that can be given are: to continue to improve performance in better financial management, place competent operators or employees, and optimize the intensification and extensification of sources of income.

Keywords: *Regional Financial Performance, Financial Ratio*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) *Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa pada saat ini berada dalam keadaan tidak baik. Dengan dilakukannya pemangkasan dana transfer, mengakibatkan ketersediaan anggaran di kas daerah semakin menipis. Hal tersebut berdampak pada kegiatan belanja rutin yang ikut terganggu. Seluruh total pendapatan daerah yang masuk lebih kecil dibandingkan dengan belanja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa yang cukup besar. Tujuan* *dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengukur seberapa jauh Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan desentralisasi fiskal dengan melihat kinerja keuangan daerahnya.*

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif induktif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa sebagai data sekunder dan hasil wawancara sebagai data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara secara tidak terstruktur dan teknik dokumentasi. Analisis data menggunakan metode analisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil/Temuan menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Kabupaten Minahasa masih tergolong rendah, dilihat dari rasio keuangan antara lain rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan. **Kesimpulan** Kinerja keuangan telah berjalan cukup efektif namun dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah masih mengalami beberapa masalah karena terdapat beberapa faktor penghambat yaitu kurangnya Pendapatan Asli Daerah, dan kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang keuangan yang menghambat proses kinerja keuangan daerah Kabupaten Minahasa.

Saran yang dapat diberikan yaitu: untuk terus meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan lebih baik lagi, menempatkan tenaga operator ataupun pegawai yang berkompeten, dan mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.

Kata Kunci: *Optimalisasi Pengelolaan Aset, Aset Tetap, Opini Laporan Keuangan*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi fiskal merupakan desentralisasi yang paling mendapat perhatian dari publik dikarenakan sebelum era reformasi semua pengelolaan keuangan telah diambil alih oleh pusat namun setelah adanya desentralisasi fiskal ini pengelolaan keuangan tersebut sebagian sudah beralih ke daerah. Penyelenggaraan desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan untuk daerah agar dalam mengelola keuangan daerah dapat berjalan dengan optimal dan kinerja keuangan pemerintah daerah semakin meningkat. Desentralisasi yang diberikan kepada daerah otonom dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antardaerah, meningkatkan kualitas pelayanan supaya lebih efektif terhadap kebutuhan, potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Peningkatan urusan pemerintahan desentralisasi dengan meningkatkan hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dan pengelolaan urusan rumah tangganya sendiri. Sebagai konsekuensi penyerahan kewenangan kepada daerah maka pemerintah wajib mengalihkan sumber-sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhan guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya pada Pemerintah Pusat dan mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Syamsi, 1986). Pengelolaan keuangan adalah kewajiban setiap orang yang harus dilaksanakan terhadap keuangannya karena berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari orang tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan sifat masyarakat yang berbeda-beda di Indonesia dalam melaksanakan pengelolaan keuangannya. Menghitung suatu pencapaian dari keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu pelaksanaan otonomi daerah selain itu menghitung suatu pencapaian keuangan dianggap penting untuk menilai tanggung jawab

pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah secara efektif. Kemajuan suatu daerah dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan daerah yang baik. Dalam mengelola keuangan daerah yang baik, selain dibutuhkan sumber daya yang bagus tetapi harus didukung juga oleh kemampuan keuangan daerah di daerah tersebut yang memadai. Kinerja keuangan daerah yang diukur dengan analisis rasio keuangan pemerintah daerah dapat digunakan untuk mengevaluasi upaya pemerintah daerah dalam menggalang kemampuan keuangan daerah. Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kinerja keuangan daerah tahun anggaran 2017-2020 di Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Dana transfer merupakan salah satunya faktornya. Dimana, Salah satu anggota DPRD Kabupaten Minahasa menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa masih lemah dalam hal pengelolaan keuangan. Hal tersebut dilihat dari tingginya dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat daripada PAD. Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa pada saat ini berada dalam keadaan tidak baik. Dengan dilakukannya pemangkasan dana transfer, mengakibatkan ketersediaan anggaran di kas daerah semakin menipis. Hal tersebut berdampak pada kegiatan belanja rutin yang ikut terganggu. Seluruh total pendapatan daerah yang masuk lebih kecil dibandingkan dengan belanja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa yang cukup besar. Faktor kedua yaitu masalah SDM. SDM dari pegawai-pegawai yang ditempatkan di bagian pengelolaan keuangan belum dapat dikerjakan secara baik. Sehingga belum dapat mengelompokkan sumber-sumber pendapatan daerah. Masih banyaknya tenaga kerja atau pegawai pada masing-masing SKPD terkhususnya di BPKAD Kabupaten Minahasa yang kurang memiliki kompetensi dalam bidang yang diampunya sehingga pemerintah harus mengeluarkan biaya lagi untuk memperkerjakan tenaga kontrak yang lebih berkompeten pada bidangnya

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks badan keuangan daerah yang mengelola keuangan daerah maupun kinerja dari pegawai dalam mengelola keuangan daerah. Penelitian Anjelia Onibala, Tri Oldy Rotinsulu, Ita Pingkan F Roring yang berjudul “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara” (2021), menemukan bahwa dampak pandemi Covid-19 menyebabkan adanya penurunan kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara di masa pandemi Covid-19 dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya namun pengaruh/dampaknya tidak signifikan. Penelitian Mailany S.D. Liow, Paulus Kindangen, Daisy S.M. Engka yang berjudul “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kota-Kota Yang Ada Di Provinsi Sulawesi utara” (2019), menemukan bahwa pengelolaan keuangan yang diukur dengan Rasio Efektifitas dan Efisiensi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, pengelolaan keuangan yang diukur dengan Rasio Efektifitas berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan dan pengelolaan keuangan yang diukur dengan Rasio

Efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Penelitian Tatas Ridho Nugroho yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa timur” (2018), menemukan bahwa secara parsial ukuran pemerintah daerah size berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena Kebanyakan aset yang dimiliki pemerintah daerah adalah aset yang kurang produktif untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Intergovernmental revenue berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena pemerintah daerah kabupaten/kota mampu menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat dengan maksimal, sedangkan belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena proporsi belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah lebih banyak digunakan untuk kebutuhan konsumtif daripada kebutuhan produktif seperti belanja modal. Ada beberapa perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya antara lain: Penelitian ini berfokus pada pengukuran jumlah target dan realisasi keuangan daerah berdasarkan beberapa rasio keuangan, dan penelitian ini bersumber dari APBD. Persamaannya terdapat pada teori yang digunakan yaitu teori kinerja keuangan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana perbedaan terletak pada fokus dan lokus penelitian, penulis mengambil judul Kinerja Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara yang kemudian akan dibahas dan diukur menggunakan teori dari Halim (2012) yang menyatakan bahwa mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran yang digunakan, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan yang pertama untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Kabupaten Minahasa tahun anggaran 2017-2021; kedua, untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kinerja keuangan daerah Kabupaten Minahasa dan ketiga, untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Minahasa dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Minahasa

II. METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan memberi gambaran tentang kondisi penelitian berdasarkan fakta yang peneliti dapat selama proses penelitian yang sumber datanya dianalisis dan dirumuskan sesuai dengan keadaan yang ditemui di lapangan. Creswell (2009:4) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah sarana untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial atau manusia. Proses penelitian melibatkan pertanyaan yang muncul dan prosedur, data yang biasanya dikumpulkan dalam pengaturan peserta, analisis data secara induktif membangun dari keterangan dengan tema umum, dan peneliti membuat interpretasi dari makna data. Mereka yang terlibat dalam bentuk penyelidikan ini mendukung cara melihat penelitian yang menghormati gaya induktif, fokus pada makna individu, dan pentingnya menerjemahkan kompleksitas situasi. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara

terhadap 7 orang informan yang terdiri dari kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kepala bidang anggaran, kepala bidang akuntansi dan verifikasi, kepala bidang kas daerah, dan UPTD sebanyak 3 orang. Silalahi dalam (Mustamil, 2019:29) mengatakan data adalah hasil pengamatan dan pengukuran empiris yang mengungkapkan fakta tentang karakteristik dari suatu gejala tertentu. Data yang telah diolah akan menjadi informasi yang penting dalam pengambilan keputusan. Dalam suatu penelitian, data menjadi hal penting dalam menunjang kebenaran penelitian. Data yang diperoleh peneliti haruslah valid, reliable, dan objektif. Sugiyono (2019:3) menyampaikan bahwa data yang valid pasti reliable dan objektif dan data yang reliabel belum tentu valid. Terdapat sumber data dalam penelitian ini yaitu: sumber data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dilapangan, dan sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi, catatan atau arsip terkait. Lofland dalam Moleong (2017:157) menyebutkan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Moleong melengkapi, jenis data terbagi atas kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan data statistik. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis rasio keuangan yang dikemukakan oleh Halim (Halim, 2012) yang menyatakan bahwa untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran yang digunakan, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kinerja Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa

Pengukuran kinerja dapat dilakukan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Berikut merupakan tabel yang menyajikan data pencapaian kinerja BPKAD Kabupaten Minahasa terhadap indikator utama.

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2020

SASARAN STRATEGI/INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Keuangan dan Aset Daerah	
Presentase SP2D tepat waktu	100%
Presentase pengesahan dan revisi DPA	100%
Presentase penghapusan barang milik daerah tepat waktu	100%
Presentase penyampaian laporan keuangan SKPD tepat waktu	100%
Presentase penyampaian laporan aset tepat waktu	100%
Perbandingan belanja langsung dan belanja tidak langsung	86,26%

Sumber : LKIP BPKAD Kabupaten Minahasa 2020

Pada Tabel 1 tersebut dapat menunjukkan bahwa ada salah satu indikator kinerja utama atau sasaran strategis yang pencapaiannya belum optimal. Sehingga dapat dianalisis dan dievaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dimasa yang akan datang.

3.2 Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan yaitu analisis rasio keuangan daerah yang dilakukan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa menggunakan indikator kinerja keuangan daerah berdasarkan teori Halim. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa yaitu :

3.2.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 3. 2
Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2017-2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Eksternal	Rasio Kemandirian
2017	105.111.635.730	1.157.799.169.844	9,07 %
2018	99.198.305.032	1.172.317.210.447	8,46%
2019	107.465.799.926	1.251.295.478.000	8,58%
2020	102.667.115.914	1.182.879.934.934	8,67%
Rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah			8,69%

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2022

Pada **Tabel 2** menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam empat tahun anggaran terakhir yaitu dari tahun 2017 hingga tahun 2020 menunjukkan presentase yang fluktuatif. Dari empat tahun perhitungan menunjukkan bahwa pada setiap tahun mengalami kenaikan rasio kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Minahasa. Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintah Kabupaten Minahasa masih sangat rendah sekali karena tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Minahasa berada pada interval antara 0-25%.

3.2.2 Rasio Efektivitas

Tabel 3.3
Perhitungan Rasio Efektivitas Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2017-2020

Tahun	Target Penerimaan PAD	Realisasi Penerimaan PAD	Rasio Efektivitas
2017	105.111.635.730	112.621.999.187	107,14%
2018	99.193.305.032	94.590.405.094	95,35%
2019	107.465.799.926	99.406.903.272	92,50%
2020	102.667.115.914	102.667.115.914	100,20%
Rata-rata Rasio Efektivitas			98,79%

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2022

Pada **Tabel 3** menjelaskan bahwa tingkat efektivitas PAD yang paling baik selama empat tahun anggaran terdapat pada tahun 2017 yakni sebesar 107,14% dengan skala interval menunjukkan

bahwa pada tahun 2017 tersebut Kabupaten Minahasa berada pada interval >100% dengan kriteria “Efektif”. Dari keseluruhan, pada empat tahun anggaran tingkat efektivitasnya dapat dikatakan cukup efektif karena selama empat tahun anggaran rata-rata rasio efektivitas PAD Kabupaten Minahasa sebesar 98,79% dengan skala interval pada kriteria 90- 100% yang tergolong bahwa Kabupaten Minahasa cukup efektif dalam merealisasikan penerimaan PAD. Namun pada kenyataannya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa masih belum mencapai target.

3.2.3 Rasio Efisiensi

Tabel 3.4
Perhitungan Rasio Efisiensi Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2017-2020

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio Efisiensi
2017	1.272.422.425.685	1.276.079.815.204	99,71%
2018	1.273.130.917.962	1.267.974.996.960	100,40%
2019	1.290.203.142.720	1.300.024.724.183	99,24%
2020	1.206.242.156.476	1.209.034.216.417	99,76%
Rata-rata Rasio Efisiensi			99,77%

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2022

Berdasarkan perhitungan yang disajikan kedalam Tabel 4, bahwa besarnya rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Minahasa pada tahun 2017 hingga tahun 2020 menunjukkan hasil bahwa efisiensi keuangan daerah Kabupaten Minahasa terletak pada kriteria “Kurang Efisien”, karena hasil yang diperoleh pada perbandingan antara total realisasi belanja daerah terhadap pendapatan daerah berada pada rentang dari 90-100% dengan hasil rata-rata rasio efisiensi sebesar 99,53%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Minahasa kurang efisien dalam mengelola pengeluaran daerah yaitu belanja daerah.

3.2.4 Rasio Keserasian

Tabel 3.5
Perhitungan Rasio Belanja Operasi Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2017-2020

Tahun	Realisasi Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Operasi
2017	819.565.774.784	1.331.799.800.187	61,53%
2018	841.527.502.062	1.342.992.215.624	62,66%
2019	818.182.774.440	1.414.637.057.412	57,83%
2020	823.323.590.030	1.355.444.411.798	60,74%
Rata-rata Rasio Belanja Operasi			60,69%

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2022

Tabel 3.6
Perhitungan Rasio Belanja Modal Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2017-2020

Tahun	Total Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Operasi
2017	209.872.194.122	1.331.799.800.187	15,75%
2018	172.850.452.990	1.342.992.215.624	12,87%

2019	194.102.964.868	1.414.637.057.412	13,72%
2020	182.093.259.303	1.355.444.411.798	13,43%
Rata-rata Rasio Belanja Modal			13,94%

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2022

Pada **Tabel 5** menjelaskan bahwa rasio belanja operasi pada pemerintah daerah pada Kabupaten Minahasa tahun 2017-2020 diperoleh nilai rata-rata yaitu sebesar 60,69%. Dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa secara umum pemerintah daerah Kabupaten Minahasa tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalokasikan sebagian besar dana yang dimilikinya diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi yaitu kebutuhan rutin daerah. Sedangkan, pada **Tabel 6** dijelaskan bahwa rasio belanja modal pada pemerintah daerah Kabupaten Minahasa tahun 2017-2020 diperoleh nilai rata-rata yaitu sebesar 13,94%. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa secara umum pemerintah daerah Kabupaten Minahasa 2017-2020 sebagian kecil dana yang dimiliki dialokasikan untuk kebutuhan belanja modal. Dilihat dari rasio keserasian pemerintah daerah Kabupaten Minahasa masih mengutamakan belanja operasi yaitu belanja rutin (belanja aparatur daerah). Akan tetapi belanja modal yaitu belanja pembangunan (belanja publik) sudah mulai mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

3.2.5 Rasio Pertumbuhan

Tabel 3.7
Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2017-2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah t_0	Pendapatan Asli Daerah t_1	Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
2016-2017	60.927.816.606	69.390.176.544	13,88%
2017-2018	69.390.176.544	93.755.330.224	35,11%
2018-2019	93.755.330.224	96.425.003.777	2,84%
2019-2020	96.425.003.777	105.903.491.248	9,83%

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2022

Tabel 3.8
Proporsi Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2017-2020

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Total Belanja
2017	696.887.147	175.138.711	5.545.566	877.571.425
2018	745.897.135	191.213.741	6.322.690	943.433.566
2019	691.932.232	201.651.885	4.728.500	898.312.618
2020	740.775.272	227.983.098	4.949.851	973.708.221

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2022

Tabel 3.9
Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2017-2020

Tahun	Belanja t_0	Belanja t_1	Rasio Pertumbuhan Belanja
2016-2017	831.370.455.459	877.571.425.067	5,55%
2017-2018	877.571.425.067	943.433.566.559	7,5%
2018-2019	943.433.566.559	898.312.618.176	-4,78%
2019-2020	898.312.618.176	973.708.221.990	8,39%

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2022

Pada **Tabel 7** menjelaskan bahwa rendahnya pengelolaan PAD yang ada menjadikan Kabupaten Minahasa masih sangat ketergantungan kepada pendapatan eksternal dalam hal ini dana transfer dan diharapkan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan sumber pendapatan yang berasal dari PAD. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dan dimasukkan kedalam **Tabel 8**, menunjukkan bahwa Kenaikan belanja tersebut sejalan dengan kenaikan PAD pada tahun yang sama pada perhitungan rasio pertumbuhan PAD sebelumnya. Kemudian pada tahun 2018 pertumbuhan belanja daerah menurun hal ini juga seiring dengan penurunan PAD pada tahun tersebut. Sedangkan, pada **Tabel 9** menjelaskan bahwa tiap tahunnya yang terjadi mengalami penurunan dan peningkatan dari tahun 2016 hingga pada tahun 2019, bahkan pada tahun 2019 mencapai angka negative yaitu -4,78%. Diharapkan untuk rasio pertumbuhan pendapatan transfer pada tahun selanjutnya untuk mencapai angka yang stabil ataupun tidak menyentuh angka negatif.

3.3 Faktor-faktor Penghambat

Kinerja keuangan daerah akan berjalan dengan baik tentunya dipengaruhi oleh faktor dari dalam maupun dari luar bagian keuangan itu sendiri. Beberapa faktor penghambat yang terjadi dalam kinerja keuangan daerah Kabupaten Minahasa yaitu :

- a. Masih kurangnya PAD dari Kabupaten Minahasa selama empat tahun anggaran
- b. Penggunaan dana PAD yang masih kurang efisien
- c. Banyaknya tenaga kerja atau pegawai pada masing-masing SKPD terkhususnya di BPKAD Kabupaten Minahasa yang kurang memiliki kompetensi dalam bidang yang diampunya
- d. Ketidakstabilan kinerja organisasi

3.4 Upaya Meningkatkan Kinerja Keuangan

Upaya-upaya yang mungkin dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Minahasa, yaitu :

- a. Pengoptimalan Intensifikasi dan Ekstenfikasi

- b. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan penelitian terkait kinerja keuangan daerah Kabupaten Minahasa ini yang dimana peneliti mengambil tahun anggaran dari 2017-2020 memberikan banyak informasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Minahasa. Pada awalnya badan yang mengelola keuangan daerah Kabupaten Minahasa dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam melakukan penginputan data-data keuangan yang diberikan oleh masing-masing kepala SKPD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) agar dapat menjalankan program dan kegiatan masing-masing SKPD tersebut. Akan tetapi, pada akhir tahun 2020, dari pihak BPKAD sendiri telah mengganti sistem penginputannya dengan SIPDA. Selain adanya SIMDA, ada juga SIMDA BMD yang dimana digunakan untuk mengelola data-data yang berkaitan dengan barang milik daerah. Perbedaan antara temuan penelitian dengan penelitian sebelumnya yakni, menurut temuan Anjelia bahwa kinerja keuangan dapat dilihat dari sikap pegawai yang ditunjukkan seperti inisiatif kerja, keterampilan pegawai, semangat kerja pegawai, dan komitmen pegawai terhadap pekerjaan. Akan tetapi, temuan yang ditemukan oleh peneliti bahwa kinerja keuangan daerah yang baik dilihat dari seberapa besar daerah tersebut dapat memanfaatkan hasil kekayaan daerah mereka sendiri dalam pemenuhan kebutuhan suatu daerah. Yang dimana suatu daerah dapat mengelola hasil-hasil kekayaan daerah mereka agar tidak dapat bergantung lagi dengan pendapatan transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat yang begitu besar. Perbedaan lain yang membedakan temuan peneliti dengan penelitian sebelumnya ialah perbedaan menggunakan teori yang nanti dipadukan dengan data-data yang diperoleh pada saat penelitian. Peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Halim (Halim, 2012) tentang analisis rasio keuangan yang dimana dalam mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran yang digunakan, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan kinerja keuangan daerah Kabupaten Minahasa, faktor penghambatnya yaitu perhitungan analisis data rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhitung sudah efektif, namun faktanya pendapatan asli daerah masih kurang efektif khususnya anggaran yang dicairkan dengan realisasinya tidak balance. Dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan yang terjadi baik dari luar dan dari dalam lingkungan kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Minahasa dalam empat tahun anggaran yaitu 8,69%. rata-rata rasio efektivitas Kabupaten Minahasa dalam empat tahun anggaran yaitu 98,79%. rata-rata rasio efisiensi Kabupaten Minahasa dalam empat tahun anggaran yaitu 99,77%. rasio keserasian belanja Kabupaten Minahasa dalam kurun waktu empat tahun anggaran menunjukkan bahwa rata-rata rasio belanja operasi Kabupaten

Minahasa sebesar 60,69% dan rata-rata rasio belanja modal Kabupaten Minahasa sebesar 13,94%. Rasio pertumbuhan PAD, belanja daerah, dan transfer daerah dalam empat tahun anggaran bersifat fluktuatif. Untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Minahasa, penulis menyarankan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Minahasa sebaiknya meningkatkan PAD agar lebih efisien, sehingga perlu dilakukan penataan dan penyesuaian maupun sensus yang optimal dalam menggali potensi daerah yang ada. Dengan dilakukannya penataan dan penyesuaian terhadap potensi daerah maka pendapatan asli daerah dapat meningkat baik dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, menempatkan tenaga operator ataupun pegawai yang berkompoten berkompoten sesuai bidangnya, dan dapat mengoptimalkan kembali peningkatan terhadap intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan potensi asli daerah yang ada.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dan biaya penelitian. Penelitian hanya dapat dilakukan dengan memperoleh informasi dari beberapa informan saja dikarenakan masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan bukan hanya di tingkat kabupaten/kota saja. Melainkan dapat dilakukan di tingkat provinsi

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari pihak-pihak yang banyak membantu dan membimbingserta memberi dukungan, motivasi dan doa kepada penulis selama ini. Maka dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada keluarga tercinta dan segenap pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Minahasa yang banyak membantu dan mensukseskan selama proses magang dan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Halim, A. & M. Iqbal. 2019. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Moleong, Lexy. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustamil, A. dan Kusumastuti. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

SUMBER BACAAN ILMIAH

- Nugroho, T. R. 2018. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten & Kota Di Jawa Timur", Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan Vol. 7, Madiun.
- Pujiastuti et al. 2020. "Analisis Dan Efisiensi Laporan Keuangan Pemerintah Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang Tahun 2017-2018", Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora Vol. 01, Salatiga.
- Liow, M, Kindangen dan Engka. 2019. "Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap

Kinerja Keuangan Pada Kota-Kota Yang Ada Di Provinsi Sulawesi Utara”, Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah Vol. 20, Manado.

Onibala, A. ,Tri dan Ita. 2021. *Dampak Pandemi Covid terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara”, Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol. 22, Minahasa.*